

PENERAPAN PSAK 405 PADA PRODUK TABUNGAN HAJI & UMROH BTN SYARIAH BERBASIS AKAD MUDHARABAH DI BANK BTN SYARIAH KCP BANDUNG

Siti Ulpaija, Gina Sakinah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : stulpajaa13@gmail.com, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 terkait Akuntansi Mudharabah pada produk Tabungan Haji & Umroh di Bank BTN Syariah KCP Bandung. Kajian difokuskan pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan standar akuntansi syariah terkini. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen laporan keuangan dan kebijakan internal bank. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BTN Syariah umumnya telah menerapkan PSAK 405 dengan benar, termasuk pengakuan dana nasabah sebagai kewajiban serta mekanisme bagi hasil sesuai nisbah yang disetujui. Studi lain pada bank syariah sejenis menunjukkan bahwa implementasi PSAK 405 relatif konsisten dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan kendala terkait transparansi informasi dan sistem pencatatan. Temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi nasabah serta penguatan sistem informasi akuntansi syariah guna menjamin kepatuhan standar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PSAK 405, Akad Mudharabah, Tabungan Haji & Umroh iB, BTN Syariah.

ABSTRACT

This study examines the application of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 405 regarding Mudharabah Accounting for Hajj & Umrah Savings products at Bank BTN Syariah KCP Bandung. The study focuses on the recognition, measurement, presentation, and disclosure of mudharabah transactions based on the latest sharia accounting standards. The research approach used is descriptive qualitative through interviews, observations, and analysis of financial report documents and internal bank policies. The results show that BTN Syariah has generally implemented PSAK 405 correctly, including the recognition of customer funds as liabilities and the profit-sharing mechanism according to the agreed ratio. Other studies of similar sharia banks indicate that the implementation of PSAK 405 is relatively consistent with applicable regulations, although challenges remain related to information transparency and recording systems. These findings underscore the importance of improving customer literacy and strengthening sharia accounting information systems to ensure ongoing compliance with standards.

Keywords: PSAK 405, Mudharabah Contract, Hajj & Umrah Savings iB, BTN Syariah.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1713
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
4.0 international license

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, salah satunya produk Tabungan Haji dan Tabungan Umroh yang menggunakan akad mudharabah. Dalam mekanisme akad tersebut, nasabah berperan sebagai shahibul maal yang menyetorkan dana kepada bank selaku mudharib, untuk kemudian dikelola dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan atas pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah berdasarkan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah ditentukan bersama sejak awal. Model hubungan ini tidak hanya menuntut kepatuhan syariah, tetapi juga memerlukan penerapan akuntansi yang tepat agar posisi dan kinerja keuangan dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, PSAK 405 diterbitkan sebagai pedoman standar dalam perlakuan akuntansi atas dana mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Standar ini mencakup ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi mudharabah, sehingga informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah serta konsisten dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain memastikan kesesuaian dengan aspek fikih muamalah, PSAK 405 juga berperan dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi, memperkuat kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah, dan mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Perbankan Syariah dan Produk Simpanan

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana setiap aktivitas bisnisnya harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Dalam operasionalnya, bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan akad-akad yang diatur dalam syariah.

Salah satu produk penghimpunan dana yang umum digunakan adalah simpanan berbasis akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara nasabah sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Melalui akad ini, dana nasabah diinvestasikan oleh bank ke sektor-sektor usaha yang halal, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Mekanisme ini tidak hanya menjadi alternatif pengganti bunga, tetapi juga mencerminkan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan dalam sistem keuangan syariah.

Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan dana (shahibul maal) dengan pihak yang mengelola dana tersebut (mudharib) untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh nantinya dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Jenis akad ini banyak diterapkan dalam produk simpanan pada perbankan syariah, termasuk produk Tabungan Haji dan Tabungan Umroh, karena sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan bagi hasil dalam sistem keuangan syariah.

PSAK 405: Akuntansi Mudharabah

PSAK 405 adalah peraturan akuntansi yang mengatur cara akuntansi transaksi mudharabah dilakukan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Menurut PSAK

405 (DSAS IAI, 2023), dana yang diterima oleh bank melalui akad mudharabah harus dianggap sebagai "dana syirkah temporer" daripada kewajiban, karena bank tidak menjamin bahwa dana akan dikembalikan kecuali terjadi kelalaian dalam manajemen.

PSAK 405 memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah dan cara penyajiannya dalam laporan keuangan. Standar ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pengakuan: Dana yang diterima dari nasabah dicatat sebagai kewajiban bank sejak dana tersebut disetorkan.
2. Pengukuran: Nilai kewajiban ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dipercayakan nasabah beserta bagian hasil yang harus dibayarkan.
3. Penyajian: Dana mudharabah ditampilkan pada bagian kewajiban dalam laporan posisi keuangan.
4. Pengungkapan: Bank wajib menjelaskan informasi terkait kebijakan pembagian hasil, besaran nisbah, serta risiko yang terkait dengan transaksi mudharabah.

Penerapan PSAK 405 berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan dan keandalan informasi pada laporan keuangan bank syariah sehingga akuntabilitas kepada nasabah dan regulator dapat terjaga.

PENELITIAN TERDAHULU

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi PSAK 405 pada berbagai bank syariah umumnya telah sesuai dengan ketentuan standar, terutama dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala terkait keterbukaan informasi kepada nasabah serta integrasi sistem pencatatan yang mendukung pelaporan syariah secara komprehensif. Sebagai contoh, hasil penelitian pada BPD DIY Syariah mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah pada lembaga tersebut secara umum telah mengikuti PSAK 405, walaupun masih perlu penyesuaian dalam pelaporan karena adanya penggabungan laporan keuangan dengan bank induknya.

Temuan serupa juga diperoleh pada penelitian di Bank Syariah Indonesia Cabang Cimahi, yang menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil dan pencatatan transaksi telah berjalan sesuai ketentuan PSAK 405. Namun demikian, penelitian tersebut menekankan bahwa peningkatan transparansi informasi kepada nasabah masih menjadi kebutuhan penting dalam rangka memperkuat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus pada Bank BTN Syariah KCP Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan produk dan pencatatan mudharabah, observasi terhadap praktik akuntansi di unit kerja terkait, serta penelaahan dokumen seperti laporan keuangan dan pedoman kebijakan internal bank. Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada unsur-unsur yang diatur dalam PSAK 405 sebagai standar akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Akad Mudharabah dalam Tabungan Haji & Umroh

Produk Tabungan Haji dan Umroh BTN Syariah menerapkan akad mudharabah muthlaqah, di mana nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan investasi yang halal dan sesuai prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagikan antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam praktiknya, pemisahan dana milik nasabah dari dana bank menjadi aspek penting agar karakteristik transaksi mudharabah tetap terjaga dan tidak tercampur dengan aktivitas pembiayaan lain milik bank.

Penerapan PSAK 405

Dalam aspek pengakuan, dana yang disetorkan oleh nasabah dicatat sebagai kewajiban bank sejak diterima dan tidak diperlakukan sebagai pendapatan, sesuai ketentuan PSAK 405. Pada tahap pengukuran, dana mudharabah dinilai sebesar jumlah kas yang dipercayakan oleh nasabah ditambah bagian keuntungan yang belum didistribusikan. Dari sisi penyajian, dana mudharabah ditampilkan sebagai kewajiban jangka pendek dalam laporan posisi keuangan syariah. Sementara itu, pada aspek pengungkapan, bank mencantumkan informasi mengenai nisbah bagi hasil dan mekanisme pembagiannya pada Catatan atas Laporan Keuangan. Praktik ini konsisten dengan hasil penelitian di berbagai bank syariah lain yang menunjukkan bahwa pencatatan transaksi mudharabah umumnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 405.

Tantangan Implementasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi, antara lain variasi tingkat pemahaman nasabah mengenai konsep nisbah dan mekanisme bagi hasil, serta keterbatasan sistem informasi akuntansi yang belum sepenuhnya terotomasi untuk menghitung bagi hasil secara real-time pada sejumlah unit kerja. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian lain pada bank syariah, yang mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi informasi kepada nasabah serta penguatan sistem pelaporan agar lebih konsisten dan akurat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 405 pada produk Tabungan Haji dan Umroh berbasis akad mudharabah di Bank BTN Syariah KCP Bandung telah berjalan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah yang berlaku. Proses pengakuan dana, pengukuran nilai kewajiban, penyajian dalam laporan keuangan, serta pengungkapan informasi transaksi mudharabah telah dilakukan secara akuntabel sesuai pedoman PSAK 405. Namun demikian, peningkatan literasi nasabah mengenai mekanisme bagi hasil serta pengembangan sistem informasi akuntansi syariah masih diperlukan agar penerapan standar dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa tentang Akad Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 405: Akuntansi Mudharabah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia.

- Istiqomah, I., & Dzikrayah, F. (2025). *Implementasi Akuntansi Mudharabah Sesuai PSAK 405 pada Produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Majalaya*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi.
- Octaviani, I., & Fithria, A. (2024). *The Implementation of the Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing: A Study on BPD DIY Syariah*. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance.
- Trisnawati, C. L., & Wardiyah, M. L. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 405 pada Produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank BJB Syariah*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi.
- Utami, A. P., & Wardiyah, M. L. (2025). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cimahi*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan.